



**DISTRIBUSI II**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK  
INDONESIA SELAKU KETUA PENGARAH TIM KOORDINASI NASIONAL  
PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, DAN INDIKATOR KINERJA  
PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU KETUA PENGARAH TIM KOORDINASI NASIONAL PENGELOLAAN  
EKOSISTEM MANGROVE,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan ekosistem mangrove nasional dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, perlu menetapkan kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja pengelolaan mangrove nasional;

b. bahwa penetapan kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove tentang Kebijakan,

Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA PENGARAH TIM KOORDINASI NASIONAL PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE TENTANG KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, DAN INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE NASIONAL.

Pasal 1

Menetapkan Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove ini.

#### Pasal 2

Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dan acuan bagi pihak terkait untuk melakukan pengelolaan ekosistem mangrove.

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional di masing-masing kementerian/lembaga, pimpinan kementerian/lembaga harus menetapkan kegiatan/rencana aksi paling lama 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove ini.
- (2) Penetapan kegiatan/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup lokasi, target kuantitatif, waktu (tahun dan durasi), dan keterangan.

#### Pasal 4

Kementerian/lembaga bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing kementerian/lembaga dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2017

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU  
KETUA PENGARAH TIM KOORDINASI  
NASIONAL PENGELOLAAN EKOSISTEM  
MANGROVE,

ttd.

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1158

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan  
Hubungan Masyarakat,



Khut Hadi Priatna  
NIP 197405071999031002

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK  
INDONESIA SELAKU KETUA PENGARAH  
TIM KOORDINASI NASIONAL  
PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG  
KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, DAN  
INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN  
EKOSISTEM MANGROVE NASIONAL

**KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, DAN INDIKATOR KINERJA  
PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE NASIONAL**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal sebagai negara kaya keanekaragaman hayati dunia karena memiliki beragam habitat alami, yang kaya dengan berbagai tipe ekosistem, sumberdaya tumbuhan dan hewan jenis endemik. Salah satu habitat alami tersebut yaitu ekosistem mangrove. Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 menyebutkan Ekosistem Mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ekosistem ini mengalami tekanan-tekanan pembangunan baik secara langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu pengelolaannya harus merupakan bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara keseluruhan.

Menurut data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2015, Indonesia merupakan negara yang memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia yaitu seluas 3,49 (tiga koma empat sembilan) juta hektar atau 21% (dua puluh satu per seratus) dengan kondisi yang masih baik seluas 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) juta hektar dan kondisi rusak seluas 1,82 (satu koma delapan puluh dua) juta hektar. Memperhatikan kondisi, manfaat dan fungsi yang tinggi bagi keberlanjutan sistem kehidupan di muka bumi serta kompleksnya permasalahan yang dihadapi berbagai pihak maka sangat mendesak diperlukan suatu strategi untuk mengelola ekosistem mangrove yang diakui oleh semua pihak/pemangku peran, dan dapat dipergunakan sebagai dasar kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove di tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Untuk mengatasi tekanan pada ekosistem mangrove di atas, maka perlu adanya strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove Indonesia agar mampu menjamin bahwa perubahan yang terjadi tidak membahayakan kelestarian fungsi ekologi dan sosial ekonomi yang dapat merugikan kehidupan generasi sekarang maupun di masa mendatang. Strategi tersebut harus mampu juga menjamin keberadaan, keberlanjutan fungsi dan manfaat ekosistem mangrove bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, strategi tersebut harus mengintegrasikan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan otonomi daerah serta arah pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan mampu memberikan arahan dalam penetapan status ekosistem mangrove, serta mampu mengintegrasikan kepentingan para pihak yang terkait dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove merupakan strategi tingkat nasional, yang akan memberi pedoman dan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), dan para pihak lainnya dalam pengelolaan ekosistem mangrove sesuai dengan karakteristik daerah.

## B. NILAI PENTING DALAM PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

Nilai penting yang berhubungan dengan pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

### 1. Nilai Penting Ekologi

#### a. Penyimpan karbon.

Ekosistem mangrove memiliki potensi penyimpanan karbon yang tinggi baik pada vegetasi mangrove maupun pada substrat mangrove. Pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan akan memiliki dampak penyerapan emisi karbon lebih besar dari pada hutan daratan.

#### b. Pencegahan dampak kerusakan lingkungan dan mitigasi risiko bencana.

Menurunnya biodiversitas dan jasa lingkungan ekosistem mangrove karena perubahan fungsi lahan berakibat meningkatnya risiko bencana. Akibat rusak/hilangnya mangrove, wilayah pesisir Indonesia menjadi rawan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim. Pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan perlu didorong menuju pendekatan yang terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana pesisir serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sehingga dapat meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir.

### 2. Nilai Penting Sosial Ekonomi

#### a. Valuasi ekonomi.

Sumbangan ekosistem mangrove untuk perekonomian nasional cukup besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015, dari sektor perikanan, ekosistem mangrove berkontribusi sebesar US\$ 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta dollar) dan belum termasuk manfaat lain seperti kayu, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta perlindungan wilayah pesisir.

#### b. Keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan.

Hutan mangrove memiliki nilai keanekaragaman flora dan fauna yang dikandungnya serta fungsi jasa lingkungan, seperti peredam bencana, mitigasi perubahan iklim, pencegah intrusi air laut, pemijahan biota laut, dan jasa lingkungan lainnya.



c. Pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi masyarakat lokal di sekitar ekosistem mangrove dalam perencanaan dan implementasi pengelolaan ekosistem mangrove perlu dioptimalkan. Mekanisme insentif juga perlu dikembangkan untuk mendukung sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah yang berkontribusi dalam kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove ramah lingkungan.

3. Nilai Penting Kelembagaan

Sinergisasi kebijakan antar sektor dalam pengelolaan ekosistem mangrove sangat penting. Untuk itu, diperlukan kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove di tingkat pusat dan daerah sebagai wadah peningkatan koordinasi kegiatan antara pusat, provinsi, kabupaten, dan/atau kota.

4. Nilai Penting Perundang-undangan

Pengelolaan mangrove telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait seperti Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa, Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, dan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Dalam rangka implementasi peraturan perundang-undangan tersebut, diperlukan sebuah kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja pengelolaan ekosistem mangrove yang lebih operasional.

**BAB II**  
**KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, DAN INDIKATOR KINERJA**  
**PENGELOLAAAN EKOSISTEM MANGROVE NASIONAL**

Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM) bertujuan untuk mensinergikan kebijakan dan program pengelolaan ekosistem mangrove yang meliputi bidang ekologi, sosial ekonomi, kelembagaan, dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin fungsi dan manfaat ekosistem mangrove secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. SNPEM dilaksanakan secara terkoordinasi sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat. SNPEM berisi arah kebijakan, misi, dan sasaran, yang selanjutnya dijabarkan melalui kebijakan, strategi, program dan indikator kinerja.

A. Target Pemulihan Ekosistem Mangrove

Dengan memperhatikan kondisi ekosistem mangrove yang rusak cukup luas yaitu sebesar 1,80 (satu koma delapan puluh) juta hektar, serta laju kerusakan yang cukup tinggi maka ditetapkan target tutupan ekosistem mangrove yang baik pada tahun 2045 sebesar 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) juta hektar, dengan tahapan sebagai berikut:

No.	Tahun	Luas Mangrove Yang Baik (Juta Ha)
1.	2017	1,69
2.	2019	1,75
3.	2024	1,95
4.	2029	2,27
5.	2034	2,69
6.	2039	3,15
7.	2044	3,47
8.	2045	3,49

## B. Kebijakan

Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengendalian pemanfaatan dan konversi ekosistem mangrove dengan prinsip kelestarian (*no net loss*).
2. Peningkatan fungsi ekosistem mangrove dalam perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan garis pantai dan sumberdaya pesisir serta peningkatan produk yang dihasilkan sebagai sumber pendapatan bagi negara dan masyarakat.
3. Pengelolaan ekosistem mangrove sebagai bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
4. Komitmen politik dan dukungan kuat Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan para pihak terkait lainnya.
5. Koordinasi dan kerjasama antar instansi dan para pihak terkait secara vertikal dan horizontal untuk menjamin terlaksananya Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
6. Pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat dengan memperhatikan nilai ekologi, ekonomi, dan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
7. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban pengelolaan ekosistem mangrove sesuai dengan kondisi dan aspirasi lokal.
8. Pengembangan riset, iptek dan sistem informasi yang diperlukan untuk memperkuat pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.
9. Pengelolaan ekosistem mangrove melalui pola kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dengan dukungan lembaga dan masyarakat internasional, sebagai bagian dari upaya mewujudkan komitmen lingkungan global.

C. Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, Indikator Kinerja dan Peran Para Pihak

Bagian ini menjelaskan 4 (empat) nilai penting, yaitu ekologi, sosial ekonomi, kelembagaan, dan peraturan perundang-undangan. Setiap nilai penting dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Nilai Penting Ekologi

Misi : Melakukan konservasi dan pemulihan ekosistem mangrove pada kawasan lindung (atau kawasan konservasi) dan kawasan budidaya (atau kawasan pemanfaatan umum).

Tujuan : Mempertahankan keberadaan dan fungsi ekosistem mangrove, serta pemulihan ekosistem mangrove yang rusak pada kawasan lindung (atau kawasan konservasi) dan kawasan budidaya (atau kawasan pemanfaatan umum).

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
1. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas ekosistem mangrove pada kawasan (atau kawasan konservasi) dan kawasan	1.1. Menetapkan ekosistem mangrove sebagai kawasan yang berfungsi lindung (atau kawasan konservasi) dan/atau berfungsi budidaya (atau	1.1.1. Penyusunan kriteria kawasan lindung (atau kawasan konservasi) dan kawasan budidaya (atau kawasan pemanfaatan umum) mangrove.	1.1.1. Tersedianya kriteria penetapan kawasan lindung (atau kawasan konservasi) dan kawasan budidaya (atau kawasan pemanfaatan umum) mangrove.	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. Kementerian ATR/BPN

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
budidaya (atau kawasan pemanfaatan umum).	kawasan pemanfaatan umum).	1.1.2. Mempercepat Penetapan status (legalitas) kawasan mangrove.	1.1.2. Jumlah kawasan mangrove yang sudah ditetapkan status legalitasnya.	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. Kemendagri 4. Kementerian ATR/BPN
		1.1.3. Penetapan dan pemasangan tanda batas kawasan lindung (atau kawasan konservasi) ekosistem mangrove.	1.1.3. Jumlah kawasan lindung (atau kawasan konservasi) yang sudah ditetapkan dan dipasang tanda batas.	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. BIG
		1.1.4. Inventarisasi kondisi ekologi mangrove pada kawasan lindung (atau kawasan	1.1.4. Tersedianya data inventarisasi kondisi ekologi mangrove pada kawasan lindung	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. BIG

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
		konservasi) dan kawasan budidaya (atau kawasan pemanfaatan umum).	(atau kawasan konservasi) dan kawasan budidaya (atau kawasan pemanfaatan umum).	
	1.2. Pengendalian konversi ekosistem mangrove.	1.2.1. Penyusunan rencana terkait pengelolaan sumberdaya mangrove.	1.2.1. Tersedianya rencana terkait pengelolaan sumberdaya mangrove pada tiap wilayah (Propinsi, Kabupaten/Kota).	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. Kementerian PPN/Bappenas 4. PEMDA
		1.2.2. Penetapan kriteria dan mekanisme proses alih fungsi mangrove.	1.2.2. Tersedianya NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) yang memuat kriteria dan mekanisme serta	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. Kemendagri

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
			proses alih fungsi mangrove.	
	1.3. Meningkatkan upaya pemulihan ekosistem mangrove dengan mengoptimalkan berbagai sumberdaya.	1.3.1. Penyusunan pedoman pemulihan ekosistem mangrove.	1.3.1. Tersedianya pedoman pemulihan ekosistem mangrove.	1. KKP 2. Kementerian LHK
		1.3.2. Pengembangan riset dan iptek pembibitan dan penanaman mangrove.	1.3.2. Tersedianya jumlah pembibitan dan penanaman mangrove yang berdasarkan hasil riset dan iptek.	1. KKP 2. Kementerian LHK 3. Kementerian Desa dan PDTT 4. LIPI
		1.3.3. Pemulihan pada ekosistem mangrove alami dan buatan.	1.3.3. Penurunan kerusakan kawasan mangrove.	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. Kemendagri

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
		1.3.4. Pemberian insentif terhadap institusi/perorangan yang berhasil dalam kegiatan konservasi dan pemulihan ekosistem mangrove.	1.3.4. Jumlah institusi/perorangan yang berhasil dalam kegiatan konservasi dan pemulihan ekosistem mangrove.	1. Kementerian LHK 2. Kemenkeu 3. Kemendagri 4. Kementerian PPN/Bappenas 5. Kementerian Desa dan PDTT
		1.3.5. Penggalangan dukungan nasional dan internasional dalam melaksanakan konservasi dan pemulihan ekosistem mangrove.	1.3.5. Meningkatnya dukungan nasional dan internasional dalam melaksanakan konservasi dan pemulihan ekosistem mangrove.	1. KKP 2. Kementerian LHK 3. Kemendagri 4. Kemenkeu 5. Kementerian PPN/Bappenas



Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
	1.4. Memprioritaskan ekosistem mangrove dalam upaya perlindungan pesisir, adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana.	1.4.1. Pengembangan riset dan iptek perlindungan pesisir, adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana berbasis mangrove.	1.4.1. Tersedianya hasil riset dan iptek perlindungan pesisir, adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana berbasis mangrove.	1. LIPI 2. Kementerian LHK 3. KKP 4. Kemendagri 5. Kementerian PPN/Bappenas 6. BIG 7. Kementerian ATR/BPN 8. Kementerian Desa dan PDTT 9. BNPB
		1.4.2. Diseminasi dan Penerapan hasil penelitian perlindungan pesisir, adaptasi perubahan iklim	1.4.2. Terimplementasikan nya hasil riset dan iptek dalam perlindungan pesisir, adaptasi perubahan iklim	1. KKP 2. Kementerian LHK 3. LIPI 4. BIG 5. BNPB

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
		dan pengurangan resiko bencana berbasis mangrove.	dan pengurangan resiko bencana berbasis mangrove.	
2. Tersedianya data dan informasi kondisi ekosistem mangrove di Indonesia yang handal, dapat dipercaya dan disepakati oleh para pihak.	2.1. Mengembangkan iptek dibidang pemetaan ekosistem mangrove.	2.1.1. Penetapan standarisasi metoda pemetaan dan inventarisasi mangrove.	2.1.1. Tersedianya standarisasi metoda pemetaan dan teknik inventarisasi ekosistem mangrove termasuk simpanan karbon atas dan karbon bawah.	1. BIG 2. Kementerian LHK 3. LIPI 4. LAPAN
		2.1.2. Membangun jejaring kerja (nasional, internasional), dalam	2.1.2. Tersedianya jejaring kerja (nasional, internasional), dalam pengembangan	1. Kementerian LHK 2. BIG 3. LAPAN 4. Kemendagri

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
		pengembangan iptek pemetaan ekosistem mangrove.	iptek pemetaan ekosistem mangrove.	5. Kementerian PPN/Bappenas 6. Kementerian ATR/BPN 7. Kementerian Desa dan PDTT 8. LIPI
		2.1.3. Diseminasi dan penerapan hasil-hasil iptek pemetaan ekosistem mangrove.	2.1.3. Terimplementasikan nya hasil iptek pemetaan ekosistem mangrove.	1. Kementerian LHK 2. BIG 3. Kementerian ATR/BPN 4. LAPAN
	2.2. Membangun data base dan sistem informasi pengolaan	2.2.1. Inventarisasi potensi dan pemetaan sumberdaya	2.2.1. Tersedianya satu peta mangrove nasional beserta simpanan karbon	1. Kementerian LHK 2. BIG 3. KKP

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
	mangrove untuk keperluan konservasi dan pemulihan.	mangrove.	yang dapat dipertanggung-jawabkan.	4. Kementerian PPN/Bappenas 5. Kementerian ATR/BPN 6. Kementerian Desa dan PDTT 7. LIPI 8. LAPAN
		2.2.2. Pertukaran data informasi ekosistem mangrove.	2.2.2. Tersedianya data dan informasi ekosistem mangrove yang lengkap, akurat, dan terkini.	1. Kementerian LHK 2. BIG 3. KKP
		2.2.3. Membangun sistem informasi pengelolaan ekosistem mangrove.	2.2.3. Tersedia dan berfungsinya web portal ekosistem mangrove.	1. Kementerian LHK 2. BIG 3. KKP

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
		2.2.4. Menyediakan sarana prasarana data base ekosistem mangrove dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.	2.2.4. Tersedianya sarana prasarana dan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan database ekosistem mangrove.	1. Kementerian LHK 2. BIG 3. KKP

Keterangan:

\*) K/L dengan urutan nomor 1 merupakan penanggung jawab utama

2. Nilai Penting Sosial Ekonomi

- Misi : 1. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove; dan  
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai manfaat sumberdaya mangrove dan pemanfaatan ekosistem mangrove yang bijak.
- Tujuan : 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan, status, fungsi dan manfaat ekosistem mangrove;  
2. Meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan ekosistem mangrove;  
3. Mengembangkan model-model (konservasi dan budidaya) pengelolaan ekosistem mangrove yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat; dan  
4. Mengembangkan pemanfaatan ekosistem mangrove berdasarkan iptek dan atau kearifan tradisional masyarakat.

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
1. Terciptanya kesamaan pemahaman pemerintah dan para pihak terhadap keberadaan, status, fungsi	1.1. Mengembangkan forum dialog tentang pengelolaan ekosistem mangrove.	1.1.1. Penguatan peran Tim Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove.	1.1.1. Meningkatnya Peran Tim Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove.	1. Kemenko Perekonomian 2. Kemenko Kemaritiman

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
dan manfaat ekosistem mangrove.		1.1.2. Penguatan peran Kelompok Kerja Mangrove Nasional Tingkat Nasional/Provinsi.	1.1.2. Meningkatnya peran Kelompok Kerja Mangrove Tingkat Nasional/Provinsi.	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. Kemendagri 4. Pemerintah Daerah
		1.1.3. Melaksanakan sosialisasi Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.	1.1.3. Meningkatnya pemahaman Daerah terhadap Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. Kemendagri
		1.1.4. Melaksanakan pertemuan nasional dan internasional tentang pengelolaan	1.1.4. Terwujudnya kesamaan pemahaman dan dukungan nasional maupun internasional dalam	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. Kementerian PPN/Bappenas 4. Kemendagri

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
		ekosistem mangrove.	pengelolaan ekosistem mangrove.	
		1.1.5. Penyelenggaraan gerakan cinta mangrove.	1.1.5. Meningkatnya gerakan cinta mangrove di daerah.	1. KKP 2. Kementerian LHK 3. Kemendagri 4. Pemerintah Daerah
	1.2. Melaksanakan penyuluhan, pendidikan dan latihan tentang pengelolaan ekosistem mangrove.	1.2.1. Penyusunan materi (modul dan pedoman) penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan lingkungan ekosistem mangrove.	1.2.1. Tersedianya (modul dan pedoman) penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan lingkungan ekosistem mangrove.	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. Kemendagri 4. Kementerian Desa dan PDTT



Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
		1.2.2. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia tentang Pengelolaan ekosistem mangrove.	1.2.2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia tentang Pengelolaan ekosistem mangrove.	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. Kemendagri 4. Kementerian Desa dan PDTT
		1.2.3. Pengembangan dan membangun stasiun-stasiun kegiatan pengelolaan ekosistem mangrove sesuai dengan karakteristik daerah.	1.2.3. Tersedianya stasiun-stasiun kegiatan pengelolaan ekosistem mangrove berdasarkan/sesuai dengan karakteristik daerah.	1. KLHK 2. Kemendagri 3. Kementerian Desa dan PDTT

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
2. Terciptanya peran masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove.	2.1. Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove.	2.1.1. Menyusun pedoman fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove.	2.1.1. Tersedianya kriteria tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove.	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. Kemendagri 4. Kementerian Desa dan PDTT
		2.1.2. Fasilitasi dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove.	2.1.2. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove.	1. KKP 2. Kementerian LHK 3. Kemendagri 4. Kementerian ATR/BPN 5. Kementerian Desa dan PDTT
		2.1.3. Penguatan dan peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam	2.1.3. Meningkatnya peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan	1. KKP 2. Kementerian LHK 3. Kemendagri

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
		kegiatan pengelolaan ekosistem mangrove.	ekosistem mangrove.	4. Kementerian ATR/BPN 5. Kementerian Desa dan PDTT
		2.1.4. Peningkatan peran perempuan dalam kegiatan pengelolaan ekosistem mangrove.	2.1.4. Meningkatnya peran perempuan dalam kegiatan pengelolaan ekosistem mangrove (edukasi, pemanfaatan, perlindungan, restorasi dan lain-lain).	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. Kemendagri 4. Kementerian ATR/BPN 5. Kementerian Desa dan PDTT 6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
		2.1.5. Peningkatan mata pencaharian alternatif masyarakat.	2.1.5. Meningkatnya ketrampilan masyarakat dalam mata pencaharian alternatif.	1. KKP 2. Kementerian LHK 3. Kemendagri 4. Kementerian Desa dan PDTT
		2.1.6. Memfasilitasi terbentuknya Kelompok-Kelompok Pemerhati mangrove.	2.1.6. Terbentuknya Kelompok-Kelompok Pemerhati mangrove di daerah.	1. Kemendagri 2. Kementerian LHK 3. KKP 4. Kementerian Desa dan PDTT
3. Tersedianya model-model pengelolaan ekosistem mangrove yang	3.1. Mengembangkan model-model pengelolaan ekosistem mangrove ramah	3.1.1. Penyusunan Pedoman Model-Model pengelolaan ekosistem mangrove ramah	3.1.1. Tersedianya Pedoman Model-Model pengelolaan ekosistem mangrove ramah lingkungan	1. KKP 2. Kementerian LHK

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
ramah lingkungan, berbasis masyarakat dan memberikan manfaat peningkatan pendapatan dan sosial ekonomi masyarakat	lingkungan, berbasis masyarakat.	lingkungan berbasis masyarakat.	berbasis masyarakat.	
		3.1.2. Penyusunan Pedoman Umum Pemanfaatan Sumberdaya Ekosistem Mangrove.	3.1.2. Tersedianya Pedoman Umum Pemanfaatan Sumberdaya Ekosistem Mangrove.	1. Kementerian LHK 2. KKP
		3.1.3. Ujicoba model budidaya perikanan ramah lingkungan terhadap ekosistem mangrove.	3.1.3. Tersedianya model budidaya perikanan ramah lingkungan terhadap ekosistem mangrove.	1. KKP 2. Kementerian LHK 3. Kemendagri 4. Kementerian Desa dan PDTT
		3.1.4. Ujicoba model pengelolaan ekosistem	3.1.4. Tersedianya model pengelolaan ekosistem mangrove	1. Kementerian LHK 2. KKP

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
		mangrove berkelanjutan berbasis masyarakat.	berkelanjutan berbasis masyarakat.	3. Kemendagri 4. Kementerian Desa dan PDTT
		3.1.5. Ujicoba model budidaya perikanan pada ekosistem mangrove yang rusak (diantaranya melalui model wanamina/ <i>silvofishery</i> ).	3.1.5. Tersedianya model budidaya perikanan pada ekosistem mangrove yang rusak (diantaranya melalui model wanamina/ <i>silvofishery</i> ).	1. KKP
		3.1.6. Ujicoba model pengelolaan ekosistem mangrove untuk adaptasi perubahan iklim	3.1.6. Tersedianya model pengelolaan ekosistem mangrove untuk adaptasi perubahan iklim dan mitigasi	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. Kemendagri 4. Kementerian Desa dan PDTT

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
		dan mitigasi bencana berbasis masyarakat.	bencana berbasis masyarakat.	
		3.1.7. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Hutan Mangrove berbasis Unit Manajemen (KPHL, KPHP, dan KPHK).	3.1.7. Tersedianya Pedoman Pengelolaan Hutan Mangrove berbasis Unit Manajemen (KPHL, KPHP, dan KPHK).	1. Kementerian LHK
		3.1.8. Penggalangan dukungan nasional dan internasional dalam pengembangan model-model pengelolaan ekosistem mangrove.	3.1.8. Meningkatnya jumlah kemitraan yang mendukung pengembangan model-model pengelolaan ekosistem mangrove.	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. Kemendagri 4. Kemenkeu

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
4. Terlaksananya pemanfaatan ekosistem mangrove berkelanjutan dengan menggunakan iptek dan kearifan lokal.	4.1. Pemanfaatan ekosistem mangrove yang berkelanjutan dengan menggunakan iptek dan kearifan lokal.	4.1.1. Inventarisasi iptek dan kearifan lokal dalam pemanfaatan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.	4.1.1. Tersedianya informasi iptek dan kearifan lokal pemanfaatan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. Kemendagri 4. BIG 5. Kementerian Desa dan PDTT 6. LIPI
		4.1.2. Melaksanakan kajian dan valuasi ekonomi ekosistem mangrove yang berkelanjutan.	4.1.2. Tersedianya informasi nilai ekonomi ekosistem mangrove yang berkelanjutan.	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. LIPI 4. Perguruan Tinggi 5. BIG
		4.1.3. Penyebarluasan informasi iptek dan kearifan lokal melalui media	4.1.3. Terlaksananya kegiatan penyebaran informasi iptek dan	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. Kemendagri



Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
		cetak dan elektronik.	kearifan lokal melalui media cetak dan elektronik.	4. BIG 5. Kementerian Desa dan PDTT 6. LIPI
		4.1.4. Penguatan iptek dan kearifan lokal dalam pengelolaan ekosistem mangrove.	4.1.4. Penggunaan Teknologi Tepat Guna dan meningkatnya peran masyarakat lokal dalam pengelolaan ekosistem mangrove.	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. Kemendagri 4. Kementerian Desa dan PDTT 5. LIPI

Keterangan:

\*) K/L dengan urutan nomor 1 merupakan penanggung jawab utama

3. Nilai Penting Kelembagaan

Misi : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

Tujuan : 1. Meningkatkan peran pemangku kewenangan pengelolaan (*management authority*) dan pemangku kewenangan penelitian (*scientific authority*) dalam pengelolaan ekosistem mangrove;  
2. Mengembangkan mekanisme sinergitas antar para pihak dalam pengelolaan ekosistem mangrove;  
3. Mengupayakan koordinasi dan integrasi program antar para pihak yang terkait dalam pengelolaan ekosistem mangrove; dan  
4. Meningkatkan kapasitas institusi pusat, daerah dan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
1. Terlaksananya mekanisme kerjasama yang sinergis antar para pihak dalam pengelolaan ekosistem mangrove.	1.1. Mengembangkan mekanisme kerjasama yang sinergis antar para pihak dalam pengelolaan ekosistem mangrove.	1.1.1. Penyusunan mekanisme kerjasama yang sinergis diantara multipihak (pemerintah, swasta, perguruan tinggi, LSM, masyarakat) dalam	1.1.1. Tersusunnya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) tentang mekanisme kerjasama multipihak (pemerintah, swasta, perguruan	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. Kemendagri 4. Kementerian PUPR 5. Kemenristek DIKTI

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
		pengelolaan ekosistem mangrove.	tinggi, LSM, masyarakat) dalam pengelolaan ekosistem mangrove.	
		1.1.2. Peningkatan peran lembaga dan media komunikasi (cetak/elektronik) parapihak.	1.1.2. Meningkatnya peran dan jumlah lembaga dan media komunikasi (cetak/elektronik) parapihak.	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. Kemendagri
2. Terciptanya koordinasi dan integrasi program antar para pihak yang terkait	2.1. Meningkatkan komunikasi yang terbuka, transparan dalam mengintegrasikan program antar	2.1.1. Peningkatan komunikasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi lintas sektor yang	2.1.1. Terwujudnya sinergitas program dan kegiatan lintas sektor yang harmonis dalam pengelolaan	1. Kemenko Perekonomian 2. Kemenko Kemaritiman 3. Kementerian PPN/Bappenas

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
dalam pengelolaan ekosistem mangrove.	para pihak yang terkait dalam pengelolaan ekosistem mangrove.	harmonis dalam pengelolaan ekosistem mangrove salah satunya melalui wadah KKMTN.	ekosistem mangrove.	4. Kemendagri 5. BIG 6. KKP 7. Kementerian LHK 8. Kementerian PUPR 9. Kementerian Desa dan PDTT 10. Kementerian ATR/BPN
3. Meningkatnya kapasitas Institusi pusat, daerah dan masyarakat dalam	3.1. Meningkatkan kapasitas Institusi pusat, daerah dan masyarakat dalam	3.1.1. Peningkatan peran Institusi Pusat dan Daerah dalam kegiatan peningkatan kapasitas	3.1.1. Meningkatnya peran Institusi Pusat dan Daerah dalam kegiatan peningkatan kapasitas	1. Kemenko Perekonomian 2. Kemenko Kemaritiman 3. Kementerian LHK

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
pengelolaan ekosistem mangrove.	pengelolaan ekosistem mangrove.	pengelolaan ekosistem mangrove tingkat nasional maupun internasional.	pengelolaan ekosistem mangrove di tingkat nasional maupun internasional.	4. Kemendagri 5. KKP 6. Kementerian Desa dan PDTT
		3.1.2. Penyelenggaraan pelatihan dan studi banding pengelolaan ekosistem mangrove.	3.1.2. Meningkatnya kemampuan dan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan ekosistem mangrove.	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. Kemendagri 4. LAPAN 5. Kementerian PPN/Bappenas 6. Kementerian ATR/BPN 7. Kementerian Desa dan PDTT 8. LIPI

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
		3.1.3. Peningkatan peran lembaga penelitian (Perguruan Tinggi, LSM, Pakar) dalam pengelolaan ekosistem mangrove.	3.1.3. Tersedianya dan terinformasikannya hasil-hasil penelitian terkait dengan pengelolaan ekosistem mangrove.	1. LIPI 2. Kementerian LHK 3. Kemendagri 4. LAPAN 5. KKP 6. Kementerian PPN/Bappenas 7. Kementerian ATR/BPN 8. Kementerian Desa dan PDTT 9. Kemenristek DIKTI
		3.1.4. Peningkatan partisipasi dan peran lembaga	3.1.4. Meningkatnya jumlah dan kontribusi lembaga	1. Kementerian PPN/Bappenas 2. Kemendagri

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
		donor (dalam negeri, dan luar negeri) dalam pengelolaan ekosistem mangrove Indonesia	donor (dalam negeri dan luar negeri) dalam pengelolaan ekosistem mangrove Indonesia (dalam bentuk MoU, kerjasama, dll)	3. BIG 4. Kemenkeu 5. KKP 6. Kementerian LHK 7. Kementerian Desa dan PDTT
		3.1.5. Peningkatan efektifitas koordinasi dan kerjasama Tim Koordinasi Nasional dan KKMTN/Provinsi.	3.1.5. Tersusunnya rencana kerja terintegrasi antar anggota Tim Koordinasi Nasional dan KKMTN/Provinsi.	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. Kemendagri 4. BIG 5. Kementerian PPN/Bappenas

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
		3.1.6. Sinkronisasi dan harmonisasi mekanisme kerja dan metode serta hubungan kerja antar unit organisasi di dalam KKMTN dan KKMT Provinsi.	3.1.6. Padu serasinya mekanisme kerja dan metode serta hubungan kerja di dalam KKMTN dan KKMT Provinsi.	1. KLHK 2. KKP 3. Kemendagri 4. Kementerian PPN/Bappenas 5. PEMDA
		3.1.7. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tugas	3.1.7. Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pengelolaan ekosistem mangrove.	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. Kemendagri 4. Kementerian PPN/Bappenas



Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
		3.1.8. Penyusunan dan penerapan standar prosedur operasi ( <i>standard operating procedure</i> ) dalam penyelesaian permasalahan pengelolaan ekosistem mangrove.	3.1.8. Tersedianya SOP dan meningkatnya penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan ekosistem mangrove.	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. Kemendagri

Keterangan:

\*) K/L dengan urutan nomor 1 merupakan penanggung jawab utama

4. Nilai Penting Peraturan Perundang-undangan

Misi : Menegakan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan ekosistem mangrove.

- Tujuan :
1. Mewujudkan kebijakan terpadu dalam pengelolaan ekosistem mangrove Indonesia;
  2. Mewujudkan status ekosistem mangrove dalam tata ruang wilayah pesisir;
  3. Mewujudkan pentaatan dan penegakan hukum dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
1. Terwujudnya kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove yang terpadu di Indonesia.	1.1. Mengarusutamakan dan mensinergikan kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove yang terpadu di Indonesia.	1.1.1. Sosialisasi Peraturan Perundangan-Pengelolaan Ekosistem Mangrove.	1.1.1. Meningkatnya pemahaman para pihak dan masyarakat mengenai Peraturan Perundangan-Pengelolaan Ekosistem Mangrove.	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. Kemendagri 4. BIG 5. Kementerian PPN/Bappenas 6. Kementerian ATR/BPN 7. Kementerian Desa dan PDTT

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
		1.1.2. Fasilitasi Penyusunan NSPK / peraturan dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove di daerah.	1.1.2. Tersedianya NSPK/ peraturan tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove di daerah.	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. Kemendagri 4. PEMDA
2. Terakomodasi-nya ekosistem mangrove dalam rencana tata ruang wilayah dan atau zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	2.1. Mengintegrasikan status ekosistem mangrove dalam tata ruang wilayah dan atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	2.1.1. Pengintegrasian strategi pengelolaan ekosistem mangrove ke dalam dokumen rencana pembangunan dan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-	2.1.1. Terintegrasinya program-program dalam strategi pengelolaan ekosistem mangrove ke dalam dokumen rencana pembangunan dan rencana tata ruang, dan/atau rencana	1. Kementerian PPN/Bappenas 2. Kementerian ATR/BPN 3. Kemendagri 4. KKP 5. Kementerian LHK 6. Kementerian PUPR

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
		pulau kecil.	zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	
		2.1.2. Fasilitasi penyusunan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Tingkat Provinsi.	2.1.2. Tersedianya Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Tingkat Provinsi.	1. Kementerian LHK 2. PEMDA 3. Kemendagri 4. KKP 5. Kementerian PPN/ Bappenas 6. Kementerian ATR/BPN 7. Kementerian Desa dan PDTT 8. BIG 9. LIPI

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
3. Terlaksananya penegakan hukum dalam pengelolaan ekosistem mangrove.	3.1. Penegakan hukum dalam pengelolaan ekosistem mangrove.	3.1.1. Sosialisasi peraturan tentang pengelolaan ekosistem mangrove tingkat pusat dan daerah.	3.1.1. Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tentang pengelolaan ekosistem mangrove tingkat pusat dan daerah.	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. Kemendagri 4. POLRI 5. Kejagung
		3.1.2. Peningkatan pengamanan ekosistem mangrove dengan melibatkan masyarakat.	3.1.2. Terbentuknya kelompok masyarakat mitra pengamanan mangrove.	1. Kementerian LHK 2. Kementerian Desa dan PDTT 3. POLRI 4. KKP 5. Kejagung 6. Kemendagri 7. BIG

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
				8. Kementerian PPN/Bappenas 9. Kementerian ATR/BPN
		3.1.3. Pelaksanaan penegakan hukum pengelolaan ekosistem mangrove.	3.1.3. Meningkatnya penyelesaian kasus hukum terkait pengelolaan ekosistem mangrove.	1. Kementerian LHK 2. POLRI 3. Kejagung 4. KKP 5. Kemendagri
		3.1.4. Peningkatan kuantitas dan kualitas penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).	3.1.4. Bertambahnya jumlah dan kemampuan PPNS dalam proses penyidikan kasus terutama di bidang kehutanan, kelautan	1. Kementerian LHK 2. KKP 3. Kemendagri 4. POLRI 5. KEJAGUNG

Sasaran	Strategi	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab*
			dan perikanan penataan ruang dan lingkungan hidup.	

Keterangan:


\*) K/L dengan urutan nomor 1 merupakan penanggung jawab utama

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU  
KETUA PENGARAH TIM KOORDINASI NASIONAL  
PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE,

ttd.

DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan  
Hubungan Masyarakat,



Ketua Hadi Priatna  
NIP 197405071999031002